



KABUPATEN PAMEKASAN

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LARANGAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridhoNya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 selesai disusun.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

Terima kasih atas kerja sama semua staf yang telah menyediakan data-data pelaksanaan kinerja tahun- tahun sebelumnya dan data-data yang akan dilaksanakan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Tahun 2021 ini.

Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data, sehingga kami masih perlu bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk kesempurnaan rencana kerja hingga pelaksanaannya .

Pamekasan, 30 Juni 2021

CAMAT LARANGAN



Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si

NIP 19720913 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pamekasan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan pedoman RPJMD diatas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2020, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif atau rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan RPJMD maupun RKPD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pamekasan menyusun Rencana Kerja, diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan seperti yang tercantum dalam RPJMD dimaksud yaitu *Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam* yang didukung dengan 6 (enam) misi yaitu :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
3. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

5. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan;
6. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari 5 tahun periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023, oleh karena itu perencanaan tahun 2019 ini merupakan rencana kerja OPD tahun awal dalam jangka menengah 5 tahun 2018 – 2023. Sehubungan dengan tersebut, agar pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Larangan selaku OPD dalam lingkup Kabupaten Pamekasan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Larangan. Rencana Kerja Kecamatan Larangan ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai di tahun 2020, dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan tahun 2020 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 73).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Larangan Tahun 2020 disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Larangan Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Restra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja serta Pendanaan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019 diselenggarakan Program berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini diselenggarakan Kegiatan sebagai berikut :

a. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi dari program dan kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur

Dalam program ini diselenggarakan Kegiatan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

e. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

g. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Realisasi dari program dan kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan

a. Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi dari program dan kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum

a. Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

c. Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

- d. Fasilitasi kepemudaan dan Olah raga
- e. Pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
- f. Koordinasi dan operasional peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional
- g. Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu
- h. Pembinaan Posyandu
- i. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- j. Fasilitasi penanganan kelancaran arus lalu lintas pasar

Realisasi dari program dan kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

5. Program Pelayanan Administrasi Kecamatan

- a. Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat
- b. Survey Kepuasan Masyarakat

Realisasi dari program dan kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 - 2023
Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Larangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	FUNGSI PENUNJANG									
3.08	PEMERINTAHAN UMUM									
3.08.07	Kecamatan Larangan									
3.08.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	92%	82%	80%	80%	100%	83%	83%	100%

3.08.07.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Terakomodir	12 kali	8 kali	8 kali			12 kali	9 kali	75%
3.08.07.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir	7 layanan	7 layanan	7 layanan			7 layanan	7 layanan	100%
3.08.07.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	88%	78%	80%	80%	100%	82%	82%	100%
		• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya								
3.08.07.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.08.07.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.08.07.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	5 item	3 item	5 item	5 item	100%	5 item	5 item	100%
3.08.07.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	5 unit	n/a	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3.08.07.02.07	Pengadaan mebeleur	Jumlah Peralatan Mebeleur Yang Diadakan	8 item	n/a	8 item	8 item	100%	8 item	8 item	100%
3.08.07.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	2 unit	n/a				2 unit	0	0%
3.08.07.02.14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.08.07.02.22	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 orang	n/a	6 orang	6 orang	100%	6 orang	5 orang	83%
3.08.07.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.08.07.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	• Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	88%	100%	80%	80%		82%	82%	100%
		Nilai Sakip	A	B	A	BB		A	BB	
3.08.07.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen sakip yang disusun dengan kualitas baik	5 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.08.07.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.08.07.03.03	Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Data	1 Dokumen	-	-			-		

	Pengumpulan/updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah	Kebutuhan Perencanaan Yang Disusun								
3.08.07.08	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Dengan Kualitas Baik	100%	90%	90%			90%	90%	100%
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	85%	70%	70%			75%	75%	100%
		Prosentase Sengketa Masyarakat Yang Tertangani	85%	70%	70%			75%	75%	100%
3.08.07.08.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
3.08.07.08.02	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	100%	14Desa	14Desa	100%
3.08.07.08.03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK yang Terfasilitasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	14 Organisasi	100%	14 Organisasi	14 Organisasi	100%
3.08.07.08.04	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah desa/kel yang terfasilitasi	14 desa/kel	14 desa/kel	14 desa/kel	14 desa/kel	100%	14 desa/kel	14 desa/kel	100%
3.08.07.08.05	Fasilitasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Yang Terfasilitasi	14 organisasi	14 organisasi	14 organisasi	14 organisasi	100%	14 organisasi	14 organisasi	100%
3.08.07.08.06	Koordinasi penguatan system pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan system pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	4 koordinasi	4 koordinasi	4 koordinasi	4 koordinasi	100%	4 koordinasi	4 koordinasi	100%
3.08.07.08.08	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordinasikan	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	100%
3.08.07.08.10	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah Pemilu Yang Dilaksanakan	2 Pemilu	2 Pemilu	2 Pemilu	2 Pemilu	100%	-	-	100%
3.08.07.08.47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi	14 Desa/Kel	14 Desa/Kel	14 Desa/Kel	14 Desa/Kel	100%	14 Desa/Kel	14 Desa/Kel	100%
3.08.07.08.48	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang Dibina	71 Posyandu	71 Posyandu	71 Posyandu	71 Posyandu	100%	71 Posyandu	71 Posyandu	100%
3.08.07.08.50	Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pilkades Yang Dilaksanakan	-	7 Desa	7 Desa	7 Desa	100%	-	-	100%

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Larangan terdiri dari 14 desa dan 105 dusun. Dari total 14 desa tersebut 12 desa dipimpin oleh kades yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dan 2 desa lainnya oleh perempuan, dengan jenjang pendidikan yang bervariasi. Jenjang pendidikan Sarjana satu sebanyak 28%, pendidikan terakhir SLTA sebanyak 64% mendominasi tingkat pendidikan kepala desa di Kecamatan Larangan, sisanya hanya sampai pendidikan SLTP.

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Larangan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik			80	83	86		80	83	86	89	
2.	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi			80	82	84	86	70	82	84	86	
3.	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya			80	82	84	86	65	82	84	86	
4.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik			80	82	84	86	82	82	84	86	
5.	Prosentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Dengan Kualitas Baik			90	90	100	100	85	90	100	100	

6.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			70	75	80	83	60	70	80	83	
7.	Prosentase Sengketa Masyarakat Yang Tertangani			84	87	90	91	75	70	90	91	
8.	Prosentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP							84	84			

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 (Perubahan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			n/a	n/a	84	86	n/a	n/a	86	89	
2.	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			n/a	n/a	86	89	n/a	n/a	84	86	
3.	Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur			n/a	n/a	84	86	n/a	n/a	84	86	
4.	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi			n/a	n/a	84	86	n/a	n/a	84	86	
5.	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan			n/a	n/a	90	91	n/a	n/a	100	100	
6.	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti			n/a	n/a	80	83	n/a	n/a	80	83	
7.	Prosentase Sengketa Masyarakat Yang Tertangani			n/a	n/a	80	83	n/a	n/a	90	91	
8.	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam			n/a	n/a	80	83	n/a	n/a			

	pemberdayaan masyarakatsesuai SOP											
9.	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik					85	90	n/a	n/a			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Larangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Larangan untuk cukup baik terlihat dari 2 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan dengan dana bantuan.
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals)
Pencapaian visi dan misi Kecamatan Larangan sebagai penjabaran visi misi kabupaten Pamekasan akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah

Dalam rancangan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 sudah termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Larangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Larangan. Berikut dilampirkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Larangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Larangan	<i>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</i>	95 %	1.462.454.250	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Larangan	<i>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</i>	95 %	1.462.454.250	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	6 dokumen 4 evcaluasi	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	6 dokumen 4 evcaluasi	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Larangan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Larangan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 unit kerja	1.235.902.704	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 unit kerja	1.235.902.704	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Larangan	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	21 orang	1.235.902.704	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Larangan	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	21 orang	1.235.902.704	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah ASN yang terfasilitasi	21 ASN	9.942.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah ASN yang terfasilitasi	21 ASN	9.942.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Larangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	21 orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Larangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	21 orang	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Larangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10 aparatur	9.942.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Larangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10 aparatur	9.942.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	18.692.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	18.692.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Larangan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	6.900.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Larangan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	6.900.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Larangan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Larangan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Larangan	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3 kali	9.792.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Larangan	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3 kali	9.792.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 unit	-	
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Larangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Larangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Larangan	Jumlah mebel yang diadakan	4 unit	-	Pengadaan Mebel	Kecamatan Larangan	Jumlah mebel yang diadakan	4 unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	-	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	2 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	2 unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	8 jasa	149.477.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	8 jasa	149.477.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 item	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 item	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 jasa	134.477.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 jasa	134.477.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 unit	28.440.546	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Larangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 unit	28.440.546	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	18.440.546	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Larangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	18.440.546	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Larangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 unit	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Larangan	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	90%	15.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Larangan	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	90%	15.000.000	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Larangan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Larangan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	5.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Larangan	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	1 kali	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Larangan	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	1 kali	5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Larangan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	100%	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Larangan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	100%	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Larangan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 pelayanan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Larangan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 pelayanan	10.000.000	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Larangan	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	40.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Larangan	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	40.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Larangan	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100	40.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Larangan	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100	40.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Larangan	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 Koordinasi	40.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Larangan	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 Koordinasi	40.000.000	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa	85%	42.499.950	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa	85%	42.499.950	

			dengan baik					dengan baik			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	42.499.950	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	42.499.950	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 desa	7.499.950	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 desa	7.499.950	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	7 desa	35.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	7 desa	35.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Kecamatan Larangan berdasarkan usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan (Perubahan)

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Larangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1.462.454.250	
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur		
			Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1.235.902.704	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	1.235.902.704	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	9.942.000	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	9.942.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah sarana yang layak fungsi	18.692.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6.900.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	9.792.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	149.477.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	134.477.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	28.440.546	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	18.440.546	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	15.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	5.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	10.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	10.000.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	-	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	
	Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	40.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	40.000.000	
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas/koordinasi yang dilaksanakan	-	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	-	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	-	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Jumlah Fasilitasi Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah partisipasi kelompok masyarakat desa dalam Forum Musrenbangdes	-	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta di kecamatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok Masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya		-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan		-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		-
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya meningkat		-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang tersedia		-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		-

	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik		42.499.950
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa		42.499.950
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik		7.499.950
	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi		-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi		35.000.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi pendampingan di desa yang terlaksana		-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pamekasan maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Larangan adalah :

- a) Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah;
- b) Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c) Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah

dan terukur;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2021
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Rumus: $\frac{\text{Nilai F01} + \text{F02} + \text{F03}}{3} \times \text{Bobot per indikator}$ - Nilai per aspek = ΣNilai per indikator - Nilai Indeks = $\Sigma(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	3,80
1.1		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	81 (A)
1.2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). - Total Nilai Persepsi Per Unsur - $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai perimbang}$ - Total Unsur yang Terisi IKM Unit Pelayanan x 25	83
1.3		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di Fasilitas X Seluruh Penyelenggaraan Ketertiban Umum X 100%	83%
1.4		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	70%
			Persentase Desa yang telah dibina	Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	82%

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Larangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3					4	5	8	11	12			13	14
7					Unsur Kewilayahan				1.559.954.200	APBD Kabupaten			2.132.409.702
7	01				Kecamatan				1.559.954.200	APBD Kabupaten			2.132.409.702
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		84%				86%	
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		86%				89%	
						Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur		84%				86%	
						Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	84%	1.462.454.250	APBD Kabupaten		86%	2.027.409.702
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	6 dokumen 4 evcaluasi	20.000.000	APBD Kabupaten		6 dokumen 4 evcaluasi	60.000.000

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kabupaten Pamekasan	6 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		6 dokumen	50.000.000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	2 kali	-	APBD Kabupaten		2 kali	-
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	2 kali	-	APBD Kabupaten		2 kali	-
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	4 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen	-
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	4 kali	5.000.000	APBD Kabupaten		4 kali	10.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	1 unit kerja	1.235.902.704	APBD Kabupaten		1 unit kerja	1.593.409.702
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaam gaji dan tunjangan	Kabupaten Pamekasan	21 orang	1.235.902.704	APBD Kabupaten		21 orang	1.593.409.702
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	21 ASN	9.942.000	APBD Kabupaten		21 ASN	25.000.000
7	01	01	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	21 orang	-	APBD Kabupaten		21	10.000.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Luar Daerah	10 aparatur	9.942.000	APBD Kabupaten		10 aparatur	15.000.000

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	80 sarana	18.692.000	APBD Kabupaten		80 sarana	3.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	1 paket	6.900.000	APBD Kabupaten		1 paket	3.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	1000 barang	2.000.000	APBD Kabupaten		-	-
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	3 kali	9.792.000	APBD Kabupaten			-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Pamekasan	10 unit	-	APBD Kabupaten		11 unit	60.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		-		APBD Kabupaten		2 unit sepeda motor	60.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	8 jasa	149.477.000	APBD Kabupaten		8 jasa	201.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Kabupaten Pamekasan	3 item	15.000.000	APBD Kabupaten		3 item	15.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	4 jasa	134.477.000	APBD Kabupaten		4 jasa	186.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pamekasan	10 unit	28.440.546	APBD Kabupaten		10 unit	85.000.000

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 unit	18.440.546	APBD Kabupaten		2 unit	30.000.000
7	01	01		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan	6 Unit	-	APBD Kabupaten		6 Unit	15.000.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	2 unit	10.000.000	APBD Kabupaten		2 unit	40.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	Kabupaten Pamekasan	90%	15.000.000			91%	15.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kabupaten Pamekasan	100%	5.000.000	APBD Kabupaten		100%	-
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	1 kali	5.000.000	APBD Kabupaten		1 kali	-
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	100%	10.000.000	APBD Kabupaten		100%	15.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	Kabupaten Pamekasan	3 pelayanan	10.000.000	APBD Kabupaten		3 pelayanan	15.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	100%	-	APBD Kabupaten		100%	

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kabupaten Pamekasan		-	APBD Kabupaten			-
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pamekasan	80%	40.000.000			83%	50.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	100	40.000.000	APBD Kabupaten		100	50.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas/koordinasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	2 kali	-	APBD Kabupaten		2 kali	-
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 kali	40.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	50.000.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Pamekasan	80%	-			83%	25.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kabupaten Pamekasan	100%	-	APBD Kabupaten		100%	15.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi kelompok masyarakat desa dalam Forum Musrenbangdes	Kabupaten Pamekasan	70 peserta	-	APBD Kabupaten		70 peserta	15.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kabupaten Pamekasan	3 lembaga	-	APBD Kabupaten		3 lembaga	10.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	3 lembaga	-	APBD Kabupaten		3 lembaga	10.000.000

7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Kabupaten Pamekasan	85 %	42.499.950			90 %	15.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Pamekasan	100 %	42.499.950	APBD Kabupaten		100 %	15.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	Kabupaten Pamekasan	14 desa	7.499.950	APBD Kabupaten		14 desa	10.000.000
7	1	06	2.01	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan		-	APBD Kabupaten		7 desa	5.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	7 desa	35.000.000	APBD Kabupaten			-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program-program yang tercantum dalam rencana kerja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Larangan pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja, sehingga perlu adanya review rencana strategis oleh manajemen perangkat daerah beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Anggaran
1	2	3	4	5
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Wilayah Kecamatan	3,80	1.559.954.200
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP	81 (A)	1.462.454.250
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	84%	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	86%	
		Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	84%	
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	84%	1.462.454.250

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	6 dokumen 4 evcaluasi	20.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 dokumen	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 unit kerja	1.235.902.704
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaam gaji dan tunjangan	21 orang	1.235.902.704
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	21 ASN	9.942.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10 aparatur	9.942.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	18.692.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	6.900.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3 kali	9.792.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	8 jasa	149.477.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 item	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 jasa	134.477.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 unit	28.440.546
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	18.440.546
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 unit	10.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sersuai pedoman standart pelayanan	90%	15.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	5.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	1 kali	5.000.000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	100%	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 pelayanan	10.000.000
Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	83	40.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	40.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100	40.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 kali	40.000.000
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan		Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	70	42.499.950
		Persentase Desa yang telah dibina	71	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	85%	42.499.950
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	42.499.950
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 desa	7.499.950
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	7 desa	35.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Larangan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018 -2023, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larangan, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Larangan Tahun 2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2021 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Larangan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Larangan ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Larangan Tahun 2022.

Pamekasan, 30 Juni 2021

CAMAT LARANGAN


Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si
NIP 19720913 199302 1 002

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Larangan Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2021	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja
3					4	5	7	8					9	10	11	12
7					KEWILAYAHAN			389.988.550		779.977.100		1.169.965.650		1.559.954.200		1.559.954.200
7	0 1				KECAMATAN			389.988.550		779.977.100		1.169.965.650		1.559.954.200		1.559.954.200
7	0 1	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	84%		84%		84%		84%		84%	
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	86%		86%		86%		86%		86%	
						Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur	84%		84%		84%		84%		84%	
						Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	84%	365.613.563	84%	731.227.125	84%	1.096.840.688	84%	1.462.454.250	84%	1.462.454.250
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	6 dokume n 4 evcaluas i	5.000.000	6 dokume n 4 evcaluas i	10.000.000	6 dokume n 4 evcaluas i	15.000.000	6 dokume n 4 evcaluas i	20.000.000	6 dokume n 4 evcaluas i	20.000.000
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokume n	2.500.000	6 dokume n	5.000.000	6 dokume n	7.500.000	6 dokume n	10.000.000	6 dokume n	10.000.000

7	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 dokume n	1.250.000	4 dokume n	2.500.000	4 dokume n	3.750.000	4 dokume n	5.000.000	4 dokume n	5.000.000
7	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	1.250.000	4 kali	2.500.000	4 kali	3.750.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 unit kerja	308.975.676	1 unit kerja	617.951.352	1 unit kerja	926.927.028	1 unit kerja	1.235.902.704	1 unit kerja	1.235.902.704
7	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	21 orang	308.975.676	21 orang	617.951.352	21 orang	926.927.028	21 orang	1.235.902.704	21 orang	1.235.902.704
7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	21 ASN	2.485.500	21 ASN	4.971.000	21 ASN	7.456.500	21 ASN	9.942.000	21 ASN	9.942.000
7	0 1	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10 aparatur	2.485.500	10 aparatur	4.971.000	10 aparatur	7.456.500	10 aparatur	9.942.000	10 aparatur	9.942.000
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	4.673.000	80 sarana	9.346.000	80 sarana	14.019.000	80 sarana	18.692.000	80 sarana	18.692.000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1.725.000	1 paket	3.450.000	1 paket	5.175.000	1 paket	6.900.000	1 paket	6.900.000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	500.000	1000 barang	1.000.000	1000 barang	1.500.000	1000 barang	2.000.000	1000 barang	2.000.000

7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3 kali	2.448.000	3 kali	4.896.000	3 kali	7.344.000	3 kali	9.792.000	3 kali	9.792.000
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	8 jasa	37.369.250	8 jasa	74.738.500	8 jasa	112.107.750	8 jasa	149.477.000	8 jasa	149.477.000
7	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 item	3.750.000	3 item	7.500.000	3 item	11.250.000	3 item	15.000.000	3 item	15.000.000
7	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 jasa	33.619.250	4 jasa	67.238.500	4 jasa	100.857.750	4 jasa	134.477.000	4 jasa	134.477.000
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 unit	7.110.137	10 unit	14.220.273	10 unit	21.330.410	10 unit	28.440.546	10 unit	28.440.546
7	0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	4.610.137	2 unit	9.220.273	2 unit	13.830.410	2 unit	18.440.546	2 unit	18.440.546
7	0 1	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabetasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 unit	2.500.000	2 unit	5.000.000	2 unit	7.500.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000
7	0 1	0 2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	90%	3.750.000	90%	7.500.000	90%	11.250.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000

7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	1.250.000	100%	2.500.000	100%	3.750.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000
7	0 1	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan	1 kali	1.250.000	1 kali	2.500.000	1 kali	3.750.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000
7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	100%	2.500.000	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
7	0 1	0 2	2.0 2	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 pelayanan	2.500.000	3 pelayanan	5.000.000	3 pelayanan	7.500.000	3 pelayanan	10.000.000	3 pelayanan	10.000.000
7	0 1	0 4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	10.000.000	80%	20.000.000	80%	30.000.000	80%	40.000.000	80%	40.000.000
7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100	10.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
7	0 1	0 4	2.0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 kali	10.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	30.000.000	2 kali	40.000.000	2 kali	40.000.000

7	0 1	0 6			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	85%	10.624.988	85%	21.249.975	85%	31.874.963	85%	42.499.950	85%	42.499.950
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	10.624.988	100%	21.249.975	100%	31.874.963	100%	42.499.950	100%	42.499.950
7	0 1	0 6	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 desa	1.874.988	14 desa	3.749.975	14 desa	5.624.963	14 desa	7.499.950	14 desa	7.499.950
7	0 1	0 6	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	7 desa	8.750.000	7 desa	17.500.000	7 desa	26.250.000	7 desa	35.000.000	7 desa	35.000.000